



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

UNIT KERJA : DIREKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIWI SUPRIHATNO**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEUANGAN**
3. NHK : **435529**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.100.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/64 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/200 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 619.700.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1979, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, MAZDA MAZDA6 ESTATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 227.700.000
6. MOBIL, VW BEETLE 2000 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	95.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.791.563.160
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.299.763.057
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	21.906.026.217
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	21.906.026.217

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.